

## ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini adalah: Akibat hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Ratio decidendi putusan praperadilan akibat tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XIII/2015.

SPDP tidak hanya dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka, melainkan juga sebagai implementasi prinsip *check and balance* antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Apabila penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XIII/2015, maka dianggap telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan karena dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuaian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum, peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*) dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP. SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor. Menurut penulis, lahirnya putusan MK ini telah memberikan kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak konstitusional terlapor dan pelapor atau seorang tersangka.

**Kata Kunci:** Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi

**ABSTRACT**

*The research method used in writing this thesis is juridical normative research (legal research), using a problem approach to the statutory approach, a conceptual approach. The problems in this thesis are: As a result of the law the Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015 was not implemented and the Ratio decidendi pretrial decision was due to not implementing the Constitutional Court's decision Number. 130 / PUU-XIII / 2015.*

*SPDP is not only considered as a mere form of administrative completeness, but also as an implementation of the principle of checks and balances between investigators and public prosecutors, reported parties, victims / complainants. If the investigator does not submit the SPDP to the public prosecutor, the reported, the victim / reporter as stipulated in the decision of the Constitutional Court Number. 130 / PUU-XIII / 2015, it was considered that there had been a procedural defect in the investigation stage because it was seen that the investigation was carried out not transparent and without any supervision. Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 states the importance of SPDP in 3 (three) main things, that is conformity with the principle of national criminal procedure law especially the principle of legal certainty, quick and open justice, the running of an integrated criminal justice system and Fulfillment of human rights which from the beginning were the main commitments forming the KUHAP. SPDP is no longer a monopoly between Investigators and Public Prosecutors but has changed its position as evidence as well as a sign of open law enforcement commitment and fulfilling legal certainty for reporters / victims and suspects / reported. According to the author, the birth of the Constitutional Court's ruling has provided legal certainty and guaranteed constitutional rights of the reported and whistleblower or a suspect.*

*Keywords: Notice of Commencement of Investigation, Court Decision  
Constitution*

*MOTO*

*“ LUPAKANLAH SEMUA KEBAIKAN KITA  
KEPADA ORANG LAIN DAN INGATLAH  
KEBAIKAN ORANG LAIN KEPADA KITA “*

*(MULYADI, S.H.)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H.,MH. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Radian Salman, S.H., LL.M.selaku Wakil Dekan III;
3. Prof. Dr Prof. Dr. Agus Yudha Herenoko, S.H., M.H. selaku ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis;
5. Bapak Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H. sebagai dosen penguji Tesis;
6. Bapak Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku dosen penguji Tesis;
7. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.H.. selaku penguji tesis;
8. Bapak Dr. Mardona, S.H.,LL.M selaku penguji tesis;
9. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

10. Keluarga Besarku, Orang tua, Istri tercinta, dan anak-anak ku, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya kepada penulis;
11. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terimakasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
12. Rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Klaten, terimakasih atas motifasi dan semua bantuannya kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini;

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 15 Mei 2020

MULYADI, S.H.  
NIM. 031814153068

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo No. 2/Pid.Pra/2018/PN.Lbj.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotamubagu No. 7/Pid.Pra/2019/PN.Ktg.